

Youth Leadership Development dalam Kebijakan Pendidikan Karakter: Analisis Konten Program Barak Militer di Jawa Barat

Ferdyansyah Wicaksono^a , Yaya Mulyana Abdul Aziz^b

^{a,b}Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung.

e-mail : ferdyansyah.23810021@mail.unpas.ac.id, bmulyana_yaya@unpas.ac.id

Abstrak

Fenomena meningkatnya kenakalan remaja di Jawa Barat mendorong pemerintah daerah meluncurkan program pendidikan karakter berbasis barak militer untuk menanamkan disiplin. Program ini menuai dukungan sekaligus kritik publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana wacana kebijakan tersebut dipersepsikan masyarakat melalui komentar *netizen* di YouTube (Kang Dedi Mulyadi Channel) dan perdebatan pakar di televisi nasional. Secara metodologi, digunakan analisis konten kualitatif terhadap ribuan komentar dan dokumentasi debat publik, dengan mengelompokkan pesan (dukungan, kritik, saran, netral). Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi wacana. Dukungan publik menguatkan legitimasi program sebagai solusi krisis disiplin, seringkali didasarkan pada pengalaman atau figur karismatik. Sebaliknya, kritik menyoroti risiko pelanggaran hak anak, trauma psikologis, dan absennya pendekatan pedagogis humanis, yang berpegang pada legitimasi normatif dan etika. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh implementasi formal, tetapi juga oleh cara ia dikomunikasikan dan dinegosiasikan dalam ruang publik digital dan formal. Implikasi praktisnya menekankan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang adaptif, mengintegrasikan narasi emosional masyarakat dengan argumen normatif pakar agar kebijakan lebih berkelanjutan dan diterima luas.

Kata Kunci: pendidikan karakter; kepemimpinan pemuda; barak militer; komunikasi publik; legitimasi kebijakan

Youth Leadership Development in Character Education Policy: A Content Analysis of the Military Barracks Program in West Java

Abstract

The rise of juvenile delinquency in West Java prompted the regional government to launch a military barracks-based character education program to instill discipline and responsibility. The program received both public support and criticism. This study aims to analyze the public discourse and perception of this policy through netizen comments on YouTube (Kang Dedi Mulyadi Channel) and expert debates on national television. Academically, the study contributes to character education literature by focusing on the digital public communication dimension. The methodology involved qualitative content analysis of thousands of netizen comments and public debate documentation, categorizing messages (support, criticism, suggestions, neutral). The findings reveal a polarization of discourse. Public support reinforces the program's legitimacy as a solution to the discipline crisis, often rooted in personal experience or charismatic figures. Conversely, criticism highlights the risks of violating children's rights, psychological trauma, and the absence of humanist pedagogical approaches, adhering instead to normative and ethical standards. In conclusion, the policy's effectiveness is determined not just by formal implementation but also by how it is communicated, perceived, and negotiated in digital and formal public spaces. The practical implication underscores the need for an adaptive policy communication strategy that integrates the emotional narratives of the public with the normative arguments of experts to ensure the policy is sustainable and widely accepted.

Keywords: *Character Education; Youth Leadership; Military Barracks; Public Communication; Policy Legitimacy.*

A. PENDAHULUAN

Media sosial tidak hanya menjadi kanal komunikasi pemerintah kepada warga, tetapi juga ruang diskusi terbuka yang memungkinkan masyarakat memberikan opini, kritik, dan dukungan secara langsung (Mustaqim et al., 2024). Fenomena ini mengubah pola interaksi kebijakan publik, yang sebelumnya lebih bersifat top-down, menjadi lebih partisipatif dan penuh dinamika. Salah satu kasus menarik yang mengemuka di Jawa Barat adalah kebijakan pendidikan karakter melalui program barak militer yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi (Mukti et al., 2025). Program ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, bela negara, dan kepemimpinan melalui pengalaman langsung dalam kehidupan barak (Parhi, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada konteks sosial yang melatarbelakanginya. Data BPS dan BNN menunjukkan bahwa kelompok usia remaja, terutama rentang 15–24 tahun, menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, serta perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh paparan lingkungan maupun media digital (Berlianti et al., 2024). Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memandang perlu adanya terobosan dalam pendidikan karakter dengan melibatkan pendekatan militeristik (Muchsam et al., 2023). Meskipun secara administratif program ini diproyeksikan mampu membentuk remaja berkarakter, berbagai kritik mengemuka dari akademisi, praktisi pendidikan, maupun lembaga perlindungan anak (Mahbubi, 2025).

Kajian pendidikan karakter melalui barak militer dapat menjadi solusi praktis bagi kenakalan remaja (Albet et al., 2024). Penelitian tersebut menekankan aspek disiplin, latihan fisik, dan pembinaan mental sebagai instrumen pembentuk perilaku baru (Murray et al., 2019). Namun kelemahan studi ini adalah minimnya sorotan terhadap bagaimana kebijakan tersebut diterima masyarakat luas, khususnya generasi muda itu sendiri, yang justru menjadi sasaran utama program (Anwari et al., 2025). Dengan kata lain, penelitian ini masih bersifat normatif dan berfokus pada pelaksanaan program dari sisi kebijakan formal, tanpa menggali bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang di ruang digital.

Kritik lain muncul dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti risiko pendekatan militer terhadap anak dan remaja. Program ini dinilai berpotensi menimbulkan stigmatisasi psikologis terhadap siswa yang dianggap “bermasalah” serta mengabaikan prinsip-prinsip pedagogis yang menekankan pendekatan humanis (Rosnawati et al., 2025). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) misalnya, menyatakan kekhawatiran bahwa target peserta tidak selalu tepat sasaran, sehingga bisa menimbulkan trauma baru bagi anak yang ditempatkan dalam lingkungan barak (Shabrina, 2025). Pandangan ini didukung oleh analisis kebijakan yang menyarankan agar pembinaan karakter dilakukan melalui integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum sekolah, bukan melalui pendekatan militeristik yang berpotensi melanggar hak anak. Kritik ini menunjukkan adanya *gap* dalam studi sebelumnya yang cenderung melihat kebijakan hanya dari perspektif implementasi

pemerintah, tanpa memperhitungkan persepsi masyarakat, terutama di ranah digital yang kini menjadi arena utama pertukaran opini (Indriani et al., 2025).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan analisis konten atas komentar netizen di kanal YouTube resmi Gubernur Jawa Barat, yakni *Kang Dedi Mulyadi Channel*. Kanal ini memiliki basis audiens yang sangat luas dengan jumlah pelanggan mencapai 8,2 juta, menjadikannya salah satu kanal individu politikus dengan jangkauan terbesar di Indonesia. Kanal ini digunakan secara aktif untuk mengkomunikasikan gagasan, aktivitas, dan kebijakan, termasuk program pendidikan karakter barak militer. Setidaknya terdapat beberapa konten video yang secara khusus menampilkan implementasi program ini. Misalnya, video berjudul *"Siswa Kabur dari Pesantren – Kini Ikut Barak Militer I Siliwangi pun Mengaum"* berhasil meraih 1,1 juta penayangan dengan 39 ribu likes dan lebih dari 4.300 komentar. Video lainnya berjudul *"Sambut Kunjungan Kak Seto I Siswa Dodik Bela Negara Mengaum"* bahkan mendapat 1,1 juta penayangan dengan 49 ribu likes dan sekitar 7.900 komentar. Masih terdapat sejumlah video serupa yang menarasikan kebijakan pendidikan karakter melalui barak militer, sehingga menyediakan kumpulan data komentar publik yang kaya dan representatif.

Pertanyaan utama yang diajukan penelitian ini adalah bagaimana tipe pesan yang muncul dalam komentar netizen mencerminkan wacana kebijakan pendidikan karakter melalui barak militer, dan bagaimana tingkat keterlibatan mereka dapat diinterpretasikan sebagai indikator efektivitas komunikasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kategori pesan yang dominan, baik yang bersifat mendukung, mengkritik, memberikan saran, maupun bersifat netral. Penelitian ini juga berupaya menelaah

indikator keterlibatan publik melalui pengukuran likes, balasan, dan intensitas percakapan dalam kolom komentar. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana opini publik di media sosial dapat memperkuat atau justru melemahkan legitimasi kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah komentar netizen pada konten video yang membahas program barak militer di kanal YouTube tersebut. Melalui metode analisis konten, komentar-komentar ini akan dikategorikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mengungkap pola wacana yang terbentuk. Dengan memfokuskan penelitian pada media sosial, studi ini menambahkan perspektif baru dalam literatur kebijakan pendidikan karakter yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis normatif kebijakan atau studi kasus implementasi program.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis konten kualitatif. Analisis konten dipilih karena mampu menelaah pesan-pesan yang muncul dari interaksi publik di media sosial, baik yang bersifat manifest maupun laten (Lindgren et al., 2020). Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan makna dari teks atau wacana yang dipublikasikan (Berger, 2018).

Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi dan menyalin komentar dari video terpilih; (2) reduksi data, yakni proses pemilahan dan pengelompokan komentar ke dalam kategori seperti dukungan, kritik, saran, maupun netral; (3) penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel frekuensi kategori; serta (4) penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasi

pola wacana publik untuk menjawab tujuan penelitian (Huberman & Miles, 2002).

C. PEMBAHASAN

Analisis konten terhadap komentar warganet pada video *"Siswa Kabur dari Pesantren – Kini Ikut Barak Militer 1 Siliwangi Mengaum"* di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan karakter melalui barak militer tidak berhenti sebagai gagasan formal pemerintah, melainkan menjadi wacana publik yang diperdebatkan secara terbuka. Kolom komentar dalam tayangan tersebut berfungsi sebagai ruang representasi opini masyarakat, tempat dukungan, kritik, saran, maupun respons netral terbentuk secara organik. Dengan demikian, komentar netizen tidak hanya dapat dibaca sebagai ekspresi individual, melainkan juga sebagai indikator sejauh mana kebijakan ini beresonansi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas.

Secara wacana, komentar netizen membentuk dua kutub utama. Pertama, dukungan yang menegaskan legitimasi program barak militer sebagai solusi atas krisis disiplin di kalangan remaja. Narasi dukungan ini umumnya mereproduksi pesan utama dalam video: kedisiplinan, ketegasan, serta perlunya keterlibatan militer dalam membina generasi muda. Dukungan tersebut sekaligus mencerminkan penerimaan terhadap model pendidikan karakter berbasis semi-militer sebagai jawaban atas kelemahan sistem pendidikan formal yang dianggap gagal menekan perilaku menyimpang siswa. Kedua, muncul kritik yang mempertanyakan pendekatan militeristik sebagai model pendidikan karakter. Netizen dalam kategori ini menyoroti risiko otoritarianisme, potensi pelanggaran hak anak, dan absennya pendekatan pedagogis yang lebih humanis. Kritik ini membangun wacana tandingan: kedisiplinan seharusnya lahir dari pendidikan yang memperhatikan psikologi anak dan

berbasis pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ruang komentar di YouTube menjadi arena kontestasi diskursif antara wacana dominan (*state-centered discipline*) dan wacana alternatif (*human-centered education*).

Jika dianalisis dari sisi sentimen, komentar netizen dapat dipetakan dalam tiga kategori utama. Sentimen positif tercermin dari ekspresi kebanggaan, apresiasi terhadap Dedi Mulyadi, serta keyakinan bahwa program ini efektif menekan tawuran. Sentimen negatif berwujud skeptisisme, kekhawatiran terhadap stigmatisasi, hingga sinisme terhadap peran pemerintah yang dianggap sekadar pencitraan. Sedangkan sentimen netral muncul dalam bentuk saran, seperti mengombinasikan barak militer dengan pendidikan agama, konseling psikologis, atau pelatihan keterampilan kerja. Keberagaman sentimen ini memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi publik tidak hanya diukur dari jumlah dukungan, melainkan dari kualitas deliberasi yang tercipta di ruang digital.

Tingkat keterlibatan (*engagement*) dalam video tersebut tinggi, ditunjukkan oleh ribuan komentar, likes, dan diskusi lanjutan antar pengguna. Hal ini memperlihatkan bahwa kanal YouTube berfungsi sebagai ruang deliberasi kebijakan yang hidup, di mana kebijakan tidak berhenti sebagai instruksi pemerintah tetapi menjadi bahan diskusi publik. Tingkat keterlibatan ini dapat dipahami sebagai indikator efektivitas komunikasi publik, meski dengan sifat ambivalen: memperkuat legitimasi melalui dukungan luas, sekaligus membuka ruang resistensi melalui kritik tajam.

Jika beralih pada konteks perdebatan di Channel Youtube TVOne dalam video tayangan berjudul *"Debat Dengan Pelapor Dedi Mulyadi, Kak Seto: Tak Ada yang Keliru dari Pendidikan Militer 1 CDK tvOne"*, wacana yang muncul bergerak dari ranah lokal menuju ranah nasional, dengan karakteristik yang berbeda.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Tayangan ini menampilkan *framing* ganda: di satu sisi, kebijakan diposisikan sebagai solusi pragmatis atas kenakalan remaja; di sisi lain, sebagai isu kontroversial yang menyentuh aspek hukum, HAM, dan psikologi pendidikan. Narasi dominan yang diangkat adalah “disiplin sebagai solusi,” di mana barak militer dianggap menutup celah kegagalan sekolah. Namun wacana tandingan muncul lebih kuat dibanding YouTube, terutama dari aktivis perlindungan anak dan psikolog, yang menekankan perlunya pendekatan humanis dan sesuai regulasi.

Sentimen dalam perdebatan TVOne juga lebih terpolarisasi. Dukungan hadir dari pihak yang menilai program ini inovatif, realistis, dan responsif terhadap masalah sosial. Kritik muncul dalam bentuk kekhawatiran normatif: risiko pelanggaran HAM, ketidaksesuaian dengan UU Perlindungan Anak, hingga stigma sosial. Dibanding komentar YouTube yang cenderung emosional dan spontan, sentimen di TVOne berakar pada argumen hukum, etika, dan bukti ilmiah, menandakan kualitas deliberasi yang lebih tinggi namun sekaligus lebih abstrak bagi masyarakat awam.

Dari segi keterlibatan, TVOne menghadirkan bentuk komunikasi publik yang formal dan terstruktur, melibatkan pejabat, pakar, dan aktivis. Efektivitas komunikasi publik dalam konteks ini tidak diukur dari *engagement* digital, tetapi dari kualitas argumen dan kemampuan mempertemukan perspektif berbeda di ruang publik. Dengan demikian, efektivitas komunikasi publik di arena televisi ditandai oleh kapasitas deliberasi yang lebih normatif dan prosedural, meski tidak seinteraktif YouTube.

Analisis komparatif antara komentar YouTube dan debat TVOne memperlihatkan perbedaan sekaligus keterhubungan antara legitimasi kebijakan dari bawah (*grassroots opinion*) dan dari atas (*expert discourse*). Dari sisi framing, komentar netizen cenderung situasional dan emosional, menilai program berdasarkan efek

langsung yang tampak; sedangkan framing pakar lebih konseptual, berorientasi pada hukum, HAM, dan etika. Dari sisi legitimasi, netizen memberi legitimasi sosial berbasis pengalaman personal dan figur karismatik; sementara pakar meneguhkan legitimasi epistemik berbasis otoritas keilmuan dan norma hukum.

Kualitas deliberasi juga menunjukkan perbedaan tajam. Ruang komentar YouTube menghasilkan volume tinggi dan keterlibatan emosional, meski argumennya terfragmentasi. Sebaliknya, debat TVOne memperlihatkan argumen yang lebih terstruktur dan berbasis evidensi, tetapi kurang menjangkau pengalaman langsung masyarakat. Dalam hal implikasi kebijakan, respons publik di YouTube dapat memberi legitimasi politik jangka pendek untuk memperkuat adopsi program, sementara diskursus pakar dapat menghasilkan tekanan regulatif yang membatasi atau merumuskan ulang kebijakan agar sesuai standar perlindungan anak.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi publik terkait kebijakan pendidikan karakter melalui barak militer bergantung pada kemampuan mengintegrasikan dua arena tersebut. YouTube efektif sebagai kanal sosialisasi dan mobilisasi publik, tetapi berisiko menghasilkan polarisasi emosional. TVOne efektif sebagai arena deliberasi formal, tetapi rawan terjebak pada perdebatan elit yang jauh dari pengalaman masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang ganda diperlukan: pemerintah dan aktor kebijakan harus mampu merespons dukungan sekaligus kritik di ruang digital, sembari menjaga koherensi dengan standar normatif yang diperdebatkan pakar.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa tipe pesan dalam komentar netizen mencerminkan wacana kebijakan pendidikan karakter melalui barak

militer yang plural, sementara tingkat keterlibatan mereka dapat diinterpretasikan sebagai indikator efektivitas komunikasi publik yang signifikan, meski tidak bebas dari ambivalensi. Kombinasi antara legitimasi *grassroots* dan legitimasi pakar menunjukkan bagaimana komunikasi publik berfungsi bukan sekadar sebagai alat sosialisasi, tetapi juga arena negosiasi makna yang menentukan penerimaan, keberlanjutan, dan arah kebijakan ke depan.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan karakter melalui barak militer membangkitkan diskusi publik yang sangat intens, baik di tingkat masyarakat maupun di ruang diskursus pakar. Analisis terhadap komentar warganet di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya dukungan emosional yang cukup besar terhadap kedisiplinan gaya militer. Banyak *netizen* melihat pendekatan ini sebagai solusi konkret untuk mengatasi perilaku menyimpang anak muda. Namun, di sisi lain, terdapat pula kritik tajam yang menyoroti potensi trauma, kekerasan terselubung, dan stigma negatif yang dapat ditimbulkan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan dari atas melalui regulasi dan argumen pakar, melainkan juga dari bawah melalui penerimaan sosial di level akar rumput.

Sementara itu, diskursus pakar yang berkembang di TVOne menyoroti dimensi hukum, HAM, dan aspek psikologis. Para akademisi, praktisi pendidikan, hingga pegiat perlindungan anak menekankan perlunya regulasi yang jelas agar program ini tidak bertentangan dengan undang-undang pendidikan maupun perlindungan anak. Konteks ini memperlihatkan kontras: di ruang digital, wacana publik lebih emosional dan naratif; sedangkan di ruang pakar, diskursus lebih rasional dan normatif.

Temuan ini memiliki implikasi penting. Pertama, efektivitas komunikasi publik tidak hanya diukur dari seberapa luas isu ini dibicarakan, tetapi juga dari bagaimana pesan kebijakan diterima dan dimaknai oleh audiens yang berbeda. Tingginya keterlibatan *netizen* menunjukkan isu ini berhasil menyentuh perhatian publik, tetapi kualitas deliberasi masih didominasi oleh ekspresi emosional, bukan argumentasi sistematis. Hal ini menandakan bahwa strategi komunikasi kebijakan perlu menjembatani dua ranah: mengelola narasi emosional masyarakat sekaligus menghadirkan penjelasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan taktis berbasis perilaku dalam komunikasi kebijakan. Pertama, *framing* kebijakan sebaiknya diarahkan pada narasi transformasi positif, bukan hukuman. Kisah sukses anak-anak yang berubah menjadi lebih disiplin atau menemukan tujuan hidupnya dapat dijadikan bahan cerita inspiratif. Kedua, pesan komunikasi perlu disesuaikan dengan segmentasi *audiens*: bagi orang tua, penekanan pada rasa aman dan disiplin; bagi remaja, narasi tentang peluang masa depan; dan bagi pakar, argumentasi berbasis data serta regulasi. Ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan ruang digital sebagai kanal umpan balik aktif, misalnya melalui *polling* atau survei singkat, sehingga masyarakat merasa suaranya benar-benar didengar. Keempat, praktik barak harus dipadukan dengan pendekatan humanis seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan pembinaan berbasis nilai budaya atau agama agar kritik pakar dapat direspon dengan nyata.

Dengan mengintegrasikan narasi emosional masyarakat dan argumentasi normatif pakar, kebijakan pendidikan karakter akan lebih mudah diterima dan berkelanjutan. Penelitian ke depan disarankan memperluas cakupan ke

media lain untuk melihat bagaimana konstruksi legitimasi kebijakan berkembang lintas ruang publik, sekaligus terus menguji pendekatan perilaku agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dan diterima secara sosial.

REFERENSI

- Afandi, M.N., Novira, A., Anomsari, E.T., Pradesa, H.A. (2024). Applying Collaborative Governance As An Intervention In Stunting Reduction An Empirical Community Empowerment Model In Sukabumi District. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 44 – 64. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50195>
- Aritonang, D. M., Harijanti, S. D., Muttaqin, Z., & Abdurahman, A. (2023). Extensive Jurisdiction of State Administrative Courts in Indonesia: Interpretation and Legal Coherence Issues. *Public Integrity*. <https://doi.org/10.1080/10999922.2023.2290750>
- Albet, M. S., Nasikhin, N., & Fihris, F. (2024). Implementation And Challenges Of Discipline Character Education. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(2), 120–124. <https://doi.org/10.21831/jpka.v15i2.77799>
- Anwar, S. (2019). Peran Komite Sekolah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3 (1).
- Anwar, S. (2021). Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Era Society 5.0. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5 (1), 101-107.
- Anwar, S. (2022). The Role of The School Committee as a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138–162. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1712>
- Anwari, A. C. A., Fahruzy, K., Aswandi, Putra, R. I. K., & Dr. Yulius Yohanes, M. S. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BARAK MILITER SOLUSI UNTUK MENGATASI SISWA/ REMAJA BERMASALAH DI PROVINSI JAWA BARAT. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 337–351. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27356>
- Berger, A. A. (2018). *Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications.
- Berlianti, Abdurahman, E. P., Ritonga, F. U., Atika, T., & Siregar, H. (2024). *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Kalangan Remaja—Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Dharmanegara, I.B.A., Harijanto, D., Jamaluddin, M.R., Agustina, I. (2023). Mengeksplorasi Dimensi Perilaku Inovatif PNS: Sebuah Studi Empiris di Kabupaten Badung. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 11 (2), 269–282. <https://doi.org/10.17509/image.2023.025>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. SAGE.
- Indriani, I., Azzahra, S., Safardi, Z., Adawiyyah, R., & Suhardi, S. (2025). MEMBANGUN KARAKTER DISIPLIN MELALUI BARAK MILITER: ANALISIS STAKEHOLDER DALAM INOVASI PENDIDIKAN. *eL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(1), 105–118. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v9i1.4675>
- Lindgren, B.-M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. *International Journal of Nursing Studies*, 108, 103632. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632>
- Mahbubi, M. (2025). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Militer: Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dalam Mengatasi Siswa Bermasalah. *Jurnal*

- Man-Anaa, 2(1), 54–66.
<https://doi.org/10.58326/man.v2i1.356>
- Muchsam, Y., Sucipto, B., Rismawati, R., Rusdianti, I. S., & Raharja, A. R. (2023). Forming the Character of a Physically Healthy Young Generation Through Military Education. *TGO Journal of Community Development*, 1(2), 90–95.
<https://doi.org/10.56070/jcd.2023.015>
- Mukti, S., Rafsanjani, M. F., Fasya, N. M., & Erihadiana, M. (2025). Implementing The Military Barracks Program For Character Education In Purwakarta: A Sociocultural Educational Review. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 9(2).
<https://doi.org/10.33751/jhss.v9i2.12286>
- Murray, E., Berkowitz, M., & Lerner, R. (2019). Leading With and for Character: The Implications of Character Education Practices for Military Leadership. *Journal of Character and Leadership Development*, 6(1).
<https://jclausafa.org/index.php/jcld/article/view/139>
- Mustaqim, D. A., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66.
<https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Parhi, N. Z. (2025). Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer. *Muadalah*, 13(1), 1–16.
<https://doi.org/10.18592/muadalah.v13i1.16723>
- Pradesa, H.A., Tanjung, H. (2021). The Effect of Principal's Spiritual Leadership Dimension on Teacher Affective Commitment. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5 (3), 69 – 81.
<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i3.2678>
- Pradesa, H. A., Tanjung, H., Agustina, I., & Salleh, N. S. N. M. (2023). Increasing proactive work behavior among teachers in islamic senior high school: the role of ethical work climate and perceived organizational support. *International Journal of Islamic Educational Psychology*, 4(2), progres.
<https://doi.org/10.18196/ijiep.v4i2.19911>
- Rosnawati, A., Basir.B, H., & Satyadharma, M. (2025). Tawuran Pelajar dan Pertimbangan Konsep Siswa Masuk Barak Militer. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 875–884.
<https://doi.org/10.63822/fr9nby59>
- Ruhyat, R.F., Pradesa, H.A., Novira, A., Wijayanti,R. (2025). Implementation of the Balanced Scorecard for Performance Evaluation at the West Java Provincial Plantation Service. *Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA)*, Vol. 12, No. 1, 14 – 27.
<https://doi.org/10.55963/jumpa.v12i1.729>
- Shabrina, D. (2025, Mei | 10.57 WIB). *KPAI: Pendidikan di Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Berpotensi Langgar Prinsip Perlindungan Anak* | *tempo.co*. Tempo.
<https://www.tempo.co/politik/kpai-pendidikan-di-barak-militer-ala-dedi-mulyadi-berpotensi-langgar-prinsip-perlindungan-anak-1453961>
- Sufianti, E., Kirana, C. A. D., Rahman, A., Cahyadi, C., Rahmi, Y., & Sundari, W. (2023, September). Cimanggung open junior high school as collaboration-based education in Cilembu Village Sumedang. In *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)* (pp. 13-22). Atlantis Press.
- Susiawati, M., Nugraha, H., Priyantoro, A. (2025). Bureaucratic Simplification: Changes in Organizational Structure From Structural to Functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1).
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>